PEMERINTAH KOTA BONTANG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. Moch. Roem No. 1 Kel. Bontang Lestari
BONTANG

BERITA ACARA
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH
NOMOR: 470/1789/HMS.3

Pada hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2019 bertempat di Sekretariat Daerah Kota Bontang, telah dilakukan Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di mana setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan sebagai berikut:

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Dokumentasi Bantuan Hukum • bukti-bukti perkara • data pribadi penerima bantuan hukum	Bukti-bukti perkara harus disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya	Pasal 17 huruf a dan h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas
2.	Data Sanggahan dan Pengaduan pada Pengadaan Barang dan Jasa	1. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan agar menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan, hal ini tertuang 2. didalam pasal 7 Peraturan Presiden	Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	30 tahun sejak proses pengadaan
3.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa • dokumen lelang/seleksi • dokumen kualifikasi		a. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Hanya boleh diakses oleh peserta lelang	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		16 Tahun 2018 bahwa Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi ETIKA sebagai berikut: bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa; 3. tidak serta merta semua informasi publik dapat diberikan kepada pemohon, dikarenakan ada konsekuensi hukum apabila memberikan informasi yang menurut klasifikasinya harus dikecualikan sesuai etika Pengadaan Barang/Jasa yang disebutkan pada pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang	berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d. Pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
4.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa • Berita Acara Hasil Tender/seleksi		a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; b. Kepmen PUPR Nomor	30 tahun sejak proses pengadaan barang/jasa

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
	• Laporan Hasil Evaluasi	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 4. Kepmen PUPR no 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijadikan acuan mengenai daftar informasi yang dikecualikan khususnya keterkaitan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa.	451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c. Pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
5.	Bukti Pembayaran/ Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya		Bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Nomor 006/VII/KIPPS-M-A/2010 Tanggal 15 November 2010	5 tahun sejak penerbitan bukti pembayaran
6.	Dokumen Kontrak		a. Khusus untuk informasi yang dirasa dapat mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	30 tahun sejak berakhirnya kontrak

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
			b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, termasuk Semua bagian yang ada di dalam dokumen kontrak merupakan informasi yg dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d. Pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
7.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		a. Pasal 7 Huruf b Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang	30 tahun setelah penetapan

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
			Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. Pasal 26 ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah c. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d. Pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
8.	Dokumen Penawaran Peserta		a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 tahun setelah penetapan pemenang

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN	DASAR HUKUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
			c. Pasal 7 huruf c Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Kepmen PUPR Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat e. Pasal 7 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
9.	Arsip Dinamis seperti SPJ Kegiatan	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa berjalan optimal	Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka apabila memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan

Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik yang dikecualikan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Tim Penguji selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Daerah:

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1.	Ir. Hj. Aji Erlinawati, MT	Sekretaris Daerah	
2.	Drs. H. M. Bahri, M.AP	Asisten Administrasi Pemerintahan	
3.	Ir. Zulkifli, MT	Asisten Administrasi Pembangunan	
4.	Ir. Hj. Sarifah Nurul Hidayati, MM	Asisten Administrasi Umum	
5.	H. Hariyadi, SH, MM	Kepala Bagian Hukum	
6.	Hj. Ajizah, SE, MM	Kepala Bagian Organisasi	
7.	Drs. Baharuddin A, M.Si	Kepala Bagian Umum	
8.	Dra. Hj. Karlina, MT	Kepala Bagian Pemerintahan Umum	
9.	Suryanto, AKS, MM	Kepala Bagian Humas dan Protokol	
10.	Akhmad Rizanie, SE, MM	Kepala Bagian Tata Usaha	
11.	Aguswati, SE, M.Si	Kepala Bagian Sosial dan Ekonomi	
12.	Agung Santoso, ST, MM	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
13.	Subur Pengestuningsih, SH	Kepala Subbag Hukum dan Perundang-Undangan	
14.	Yessy Rita Apsati, SH	Kepala Subbag Bantuan Hukum	

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
15.	Wahyuni, SSTP	Kepala Subbag Penelaahan dan Dokumentasi Hukum	
16.	Atifah Hanum Adhawiyarti, SSTP	Kepala Subbag Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur	
17.	Toto Julinawansyah, SH	Kepala Subbag Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi	
18.	Ali Husni, SH	Kepala Subbag Tata Laksana dan Pelayanan Publik	
19.	Wahidin, SE	Kepala Subbag Rumah Tangga	
20.	H. Lamri, SE	Kepala Subbag Perlengkapan	
21.	Hatamuddin, SE, M.Si	Kepala Subbag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah	
22.	M.Ihsan, SSTP	Kepala Subbag Bina Otonomi Daerah dan Administrasi Wilayah	
23.	Arif Supriyadi, SSTP	Kepala Subbag Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
24.	Anna Kus Saparti, SS., M. Si	Kepala Subbag Pemberitaan dan Peliputan	
25.	Rendy Iriawan, SSTP	Kepala Subbag Protokol	
26.	Mustika T, ST	Kepala Subbag Pelayanan Informasi	
27.	Nasution, S.SOS, M.Si	Kepala Subbag Administrasi Umum dan Kepegawaian	
28.	Hj. Ernawati, SE	Kepala Subbag Perencanaan dan Anggaran	
29.	Punagi, SH	Kepala Subbag Keuangan	

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
30.	Iji Jayusman, ST	Kepala Subbag Sosial	
31.	Defri Kurniawan, SE, ME	Kepala Subbag Ekonomi	
32.	Andik Dwi Rianto, ST	Kepala Subbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	
33.	Lili Fajarwati, S.Si	Kepala Subbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
34.	Risma Mian Hot, ST	Kepala Subbag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	